**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI DI KOTA SEMARANG**

(Suparno, Karmanis )

***ABSTRACT***

*The Republic of Indonesia is a democratic country, all practices of implementing state power must be based on the will of the people. The success of a country in holding elections that are direct, general, free and confidential will be a measure of the value of the success of the implementation of democracy, the voice of the people in a democratic country is a very valuable value because the people determine the government itself. In this study, researchers formulated how the strategy of applying political education as an effort to increase public participation in realizing a democratic system in the city of Semarang. By using descriptive qualitative research methods. This research was conducted in the city of Semarang, Central Java.*

*The results of the study: First, the implementation of political education conducted by the Semarang City government has not yet run optimally. This is indicated in the results of research that show the role is not yet optimal in providing the information needed for the implementation of public political participation, especially the political participation of young people in political activities. Second, the Media (political parties), as an aggregation of the interests of the people, have to work even harder to build a communication system, one of which is when gathering public aspirations in public consultation forums. Because the public consultation forum is a media meeting between the legislature and the public directly to be expected to become a medium to build real communication about the problems that occur in the community. Third, the implementation of political education, carried out using various methods and strategies including: training and coaching activities, seminars, studies, outreach and social activities. Implementation is determined according to the right conditions, scheduled and routine, but does not rule out the possibility of activities adapted to existing conditions.*

*Recommendations: First, the quality of the organizer especially at the ad hoc committee level needs to be maximized. There are still people who do not vote because of technical problems. KPU's dissemination to the public needs to be intensified as well. Many did not vote because they were not registered in the DPT or did not get clear information related to voter obligations. Second, E-Vote. In the context of direct elections the concept of E-Vote is very likely to be applied, especially in regions or regions which are in sufficient resources. This can support the realization of effective and efficient direct elections, and minimize the potential for manipulation of vote counting.*

*Keywords: Political Education, Participation, Democracy*

**Abstrak**

Republik Indonesia merupakan negara demokrasi, segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan bagaimana strategi penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi di kota semarang. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Hasil penelitian: *Pertama*, Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang, belum berjalan secara maksimal. Hal ini terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukan belum maksimalnya peranannya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi politik generasi muda pada aktifitas politik. *Kedua,* Media (partai politik) sebagai agregasi kepentingan masyarakat, harus lebih keras lagi membangun sistem komunikasi, salah satunya pada saat penjaringan aspirasi publik dalam forum konsultasi publik. Karena forum konsultasi publik merupakan media pertemuan antara legislatif dan masyarakat langsung untuk diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komunikasi riil tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. *Ketiga*, Pelaksanaan pendidikan politik, dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain: kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Rekomendasi: *Pertama*, Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Masih terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. *Kedua, E-Vote*. Dalam konteks Pemilu langsung konsep E-Vote sangat mungkin diterapkan, khususnya daerah atau wilayah-wilayah yang secara sumber daya sudah memadai. Hal ini dapat mendukung terwujudnya Pemilu langsung yang efektif, dan efisien, serta meminimalisir potensi manipulasi penghitungan suara.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partisipasi, Demokrasi

* 1. **Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi, karena itu segala praktek penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berdasarkan pada kehendak rakyat. Dalam pasal1ayat 2 UUD 1945 yang telah dimandemen. Segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat. Pendidikan politik sangat diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis, kritis dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan masyarakat, baik terhadap pengetahuan maupun hak-hak hidupnya sehingga mereka menjadi manusia pembangunan yang sadar politik dan bertanggung jawab.

Pemilihan umum (Pemilu) salah satu sarana suksesi politik dalam sebuah negara yang demokratis. Dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggaraan demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah Kota Semarang memiliki berwenang terhadap pemilihan umum (Pemilu) memilki program pendidikan politik untuk masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum legislative, pemilihan presiden dan kepala daerah.

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, perlu dilaksanakan kajian akademik “Penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi di Kota Semarang.

* 1. **Perumusan masalah**

Dalam penelitian ini merumuskan: Bagaimana Penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi di Kota Semarang?

* 1. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber Data: Sumber Data Primer, (hasil wawancara, dan observasi) dan Sumber Data Sekunder (produk hukum daerah dan buku-buku literatur, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan). Teknik Pengumpulan Data dengan wawancara, dan studi pustaka, serta Diskusi (FGD). Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis model interaktif, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data, mengunakan kriteria, yakni: *Credibility, Transferability, Dependability, dan Confirmabilitys.*

* 1. **Kajian Pustaka**
  2. **Pendidikan Politik**.

Pendidikan politik suatu upaya peningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk-Bentuk Pendidikan Politik, Menurut Rusadi Kantaprawira (2004:56) bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun iniformal.

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan politik dasar hukum nya adalah pancasila dan UUD 1945. Di Indonesia materi serta kurikulum bagi proses pendidikan politik generasi muda diatur dalam Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik antara lain:

1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara,
2. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama;
3. Motivasi berprestasi;
4. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia;
5. Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik;
6. Disiplin pribadi, sosial, dan nasional;
7. Kepercayaan pada pemerintah;
8. Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

**Sarana (agen-agen) Pendidikan Politik.** Menurut Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas’oed (1978:35-37), sosialisasi dijalankan melalui bermacam-macam lembaga. diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan sengaja dirancang demi tujuan pendidikan politik. Lainnya, seperti kelompok bergaul dan bekerja, hanya cenderung untuk mempengaruhi sosialisasi secara tidak langsung.

* 1. **Demokrasi**

Negara demokrasi merupakan negara yang meletakan kekuasaan tertinggi di tangan rakyatnya. Rakyat dilibatkan dalam menentukan setiap kebijakan dalam pemerintahan. Seperti yang dikemukakan oleh Abd. Rahman Assegaf (2004: 140) yang mendefinisikan demokrasi dari asal usul kata yaitu berasal dari kata demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Harris Soche (Winarno, 2010: 91), demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat.

Senada dengan pendapat Zamroni (2001: 32) yang menyebutkan nilai demokrasi yaitu, a) toleransi, b) kebebasan mengemukakan pendapat, c) menghormati perbedaan pendapat, d) memahami keanekaragaman dalam masyarakat, e) terbuka dalam komunikasi, f) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, g) percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain, h) saling menghargai, i) mampu mengekang diri, j) kebersamaan, dan k) keseimbangan. Nilai demokrasi tidak secara langsung ditanamkan pada diri seseorang, melainkan tahap demi tahap.

* 1. **Hasil Penelitian**
  2. **Penerapan Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Di Kota Semarang**

Pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia khususnya Kota Semarang, merupakan salah satu kunci dalam upaya memperbaiki sistem demokrasi. Tanpa itu pesta demokrasi (pemilu) hanya menjadi semacam ritual lima tahunan dimana rakyat hanya menjadi obyek pendulang suara kontestan pemilu tanpa pernah tahu untuk apa rakyat memilih. Berikut hasil penelitian di lapangan dalam menyampaikan pendapat tentang penerapan pendidikan politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sistem demokrasi di Kota Semarang.

Siapa sajakah yang berperan dalam pendidikan politik ? menyelenggarakan pendidikan politik, dilakukan oleh tokoh masyarakat (pengamat politik),komisi pemilihan umum (kpu) dan bawaslu, partai politik, pemerintahan kota (kesbangpol), organisasi pemuda, organisasi perempuan, media massa, dan lain lain.

Hasil penelitian disampaikan oleh informan sebagai Tokoh Masyarakat (Pengamat Politik) bahwa: “Warga yang senantiasa aktif di masyarakat (*active citizenship*), untuk itu perlu meningkatkan pengetahuan politik. *Active citizenship* adalah warga negara yang bukan hanya memiliki pengetahuan tapi tahu betul bagaimana menggunakan pengetahuan politiknya di dalam proses untuk menentukan berjalannya negaranya.

Pendidikan politik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat tentang urgensi Pemilu sehingga muncul sikap proaktif dari masyarakat untuk memberikan hak suaranya secara baik, benar dan penuh tanggung jawab. Seperti disampaikan oleh Informan (KPU Kota Semarang) menyatakan bahwa, “Pendidikan politik oleh partai politik memang sangat penting, karena kampanye dan sosialisasi kepada pemilik akan lebih masif ketika yang menyampaikan adalah mereka yang memiliki ideologi kepartaian dan perjuangan yang sama”. Informan lainnya (Ketua Bawaslu) menambahkan, “secara umum di Jateng khususnya di Kota Semarang, berdasar Indeks Kerawanan Pemilu yang dibuat Bawaslu RI, kita berada di indeks sedang dan rendah. Kami juga identifikasi potensi kerawanan-kerawanan di Jawa Tengah”. Adanya pendidikan politik diharapkan semua masyarakat Indonesia dapat terlibat dalam Pemilu sehingga pesta demokrasi dapat berjalan tertib, lancar, dan sukses.

Peran partai politik, Informan, (Partai Gerindra) memberikan pendidikan politik bukan karena iming-iming uang dan pencitraan tapi kesadaran. Upaya Partai Domokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memberikan pemahaman kepada masyarakatnya agar menjadi masyarakat yang mempunyai jiwa militan dan kritis terhadap partai maupun permasalahn bangsa. Pendidikan politik adalah salah satu upaya strategis mendemokrasikan bangsa Indonesia. yang berorientasi pada pembangunan karakter bangsa, sehingga menjadi masyarakat kritis, kreatif, partisipatif dan dapat mengaktualisasikan diri mereka.

Selanjunya adalah peran pemerintahan Kota Semarang, diwakili oleh Kesbangpol Kota Semarang, yaitu menanamkan nilai kebangsaan lewat gema kebangsaan. Informan (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik /Kesbangpol) Kota Semarang, mengatakan, “Gema Kebangsaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan terus menerus guna memberikan pemahaman nilai-nilai kebangsaan di Kota Semarang. Agar mampu menciptakan dan mewujudkan kerukunan di Kota Semarang. Selain Gema Kebangsaan, pihaknya menambahkan, ada pula program bela negara, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik untuk memberikan dan menyebarkan virus nilai-nilai kebhinekaan dan berkebangsaan.

Sebagian pemilih adalah orang-orang muda, bahkan terdapat pemilih baru yang belum pernah memilih karena batasan umur dan saat ini sudah bisa berpartisipasi. Informan mengatakan “ Kami mengajak pemilih pemula ini untuk antusias menggembirakan pesta demokrasi 2019." Menurutnya, pemilih pemula harus menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai tanda kedewasaan berpikir dan bersikap, belajar bertanggung jawab sebagai warga negara, dan menghapus stigma bahwa generasi muda abai terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian juga pendidikan politik bagi perempuan, di Kota Semarang pemilih perempuan (583.649 jiwa) menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam pendidikan politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang karena selain populasinya yang banyak melebihi pemilih laki-laki (550.630 jiwa), juga karena adanya hambatan bagi perempuan di Kota Semarang dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik dan terbatasnya akses informasi termasuk tentang Pemilu. Misalkan faktor sosial, pemilih perempuan di Kota Semarang yang tinggal di lingkungan asrama TNI/Polri. Perempuan yang tinggal di lingkungan asrama tersebut pada umumnya memiliki kepala keluarga sebagai anggota TNI/Polri yang tidak memiliki hak politik. Informan mengatakan bawah : “Perempuan yang tinggal di lingkungan ini jarang mendapatkan informasi seputar politik, sehingga kurang tertarik dengan urusan politik”. Perempuan di lingkungan asrama lebih banyak beraktifitas terkait urusan kedinasan dari suaminya.

Pendidikan politik peran media massa tak kalah penting. Di era globalisasi yang serba canggih ini, sangat mudah untuk menyampaikan berbagai informasi. Pemerintah harus mampu memanfaatkan media tersebut untuk memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan seringnya beropini di media cetak maupun elektronik. Dengan konten sekreatif mungkin dalam pemberian pemahaman pendidikan politik secara tidak langsung masyarakat akan menyerap informasi yang didapat di media massa.

Dengan demikian pendidikan politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan politik, maka fungsi yang paling mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahami secara benar tentang apa yang ada dalam politik

* 1. **Pembahasan Hasil Penelitian**

1. **Pendidikan Politik (*Political Education*)**.

Pendidikan [politik](https://www.kompasiana.com/tag/politik) adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,dikan yang mampu pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Tingkat pendidikan sangat berperan didalam daya penyerapan serta kemampuan berkomunikasi. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu

Pendidikan politik juga bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada massanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi, serta hak dan kewajibannya sebagai manusia atau warga negara. Sudah saatnya pendidikan politik bagi masyarakat dalam segala kalangan usia diwujudkan dalam kegiatan yang nyata. Bukan hanya tertera pada UU partai politik ataupun menjadi program-program di atas kertas tanpa realisasi bagi partai politik.

Pendidikan politik masyarakat merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Dengan demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan : (1) Pembentuk kepribadian politik, Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya. (2) Kesadaran politik, Untuk menumbuhkan kesadaran politik dapat ditempuh dua metode yaitu dialog dan pengajaran instruktif. Dan (3) Parsisipasi politik. Adapun partisispasi politik, ia terwujud dengan keikutsertaaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pendidikan Politik merupakan “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Sedangkan konsep ilmu politik menurut Ramlan Surbakti adalah “kebaikan bersama merupakan tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebajikan, kebahagiaan dan kebenaran. Kebaikan bersama diartikan dengan kepentingan umum, sebagai keinginan orang banyak (general will) (Surbakti, 1992: 2). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo “Politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik”, (Budiarjo, 2004: 4). Bila kita ambil inti sarinya, bahwa Politik dianggap sebagai kumpulan nilai kebaikan dan sekaligus kebenaran yang seharusnya.

**Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik,** dalam Pasal 11 angka 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas.

Pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga diatur mengenai pendidikan politik yakni kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi anggotanya. Hal di atas merupakan gambaran yang sama di dalam kehidupan masyarakat khususnya masayarakat kota Semarang, meskipun menurut data KPU tahun 2014 pemilih Kota Semarang meningkat dibandingkan pada pemilu tahun 2009.

Partai politik memiliki tanggung jawab yang jelas disuratkan dalam Undang-undang untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga partai politik di Kota Semarang dapat memberikan contoh dan menjadai barometer partai politik di kota lain dalam pelaksanaan pendidikan politik.

1. **Strategi Pendidikan Politik di Kota Semarang**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Pelaksanaan pendidikan politik, dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain: kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Misalkan strategi KPU Kota Semarang dalam Mensosialisasikan Pemilu 2019. Pada strategi KPU Kota Semarang berdasarkan evaluasi jangka panjang pada pembelajaran, KPU Kota Semarang membuat terobosan dan kreasi berkelanjutan seperti melibatkan Pemilihan Ketua OSIS atau Pemilos. Dari interaksi beberapa ribu orang atau umum yang lain dari rekan atau keluarga bahkan saudara maka dapat membuat efek untuk bekal tingkat partisipasi berikutnya. Strategi inilah pihak KPU Kota Semarang mencanangkan cara pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Semarang. Selain itu faktor Multiple Effect sebagai bekal pemilu untuk tahun 2015, 2019 yang bersamaan dengan efek pemilu serentak pertama kali atau melaui DPRD seperti tahun sebelumnya yang menimbulkan kontroversi. Kontoversi ini digunakan sebagai komunikasi publik sehingga ada hal yang rasakan masyarakat. Strategi KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Semarang ada beberapa cara yang dilakukan KPU Kota Semarang yaitu :

*Pertama,* melihat berdasarkan jangka panjang pada pembelajaran melalui Pemilihan sebelumnya, tingkat partisipasi paling rendah, maka dari itu pada tahun 2019 KPU Kota Semarang melakukan terobosan dan kreasi berkelanjutan seperti meilbatkan Pemilihan Ketua OSIS (Pemilos). Hal ini agar mendapatkan interaksi dari kelompok sasaran tersebut, bahkan diharapkan melalui interaksi ini, Pemilos dapat menyebar luaskan kembali informasi yang didapat ke lingkungan sekitarnya. Selain itu sebagai bahan pertimbangan umtuk bekal sosialisasi, KPU Kota Semarang bekerja sama dengan akademisi.

*Kedua,* Dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh terdiri dari beberepa materi, kemlompok sasaran, media, dan metode yang terdiri dari : (a) Materi Tahapan Sosialisasi Persiapan yang dilakukan pada kelompok sasaran seperti Partai Politik, Elemen Pemerintah, Mitra KPU, Mitra Kesehatan, Mitra Dinas terkait, serat kelompok masyarakat dan PPK Kota Semarang dengan metode Rapat Koordinasi yang menggunakan media langsung atau tatap muka, (b) Materi Tahapan Perencanaan dan Sosialisasi yang dilakukan setelah rapat koordinasi yang diikuti oleh kelompok sasaran seperti Instansi Pemerintah, Kapolres, organisasi masyarakat, tokoh agama, kaum marjinal, kaum pelajar, dan kaum profesi yang ber-KTP Semarang. Hal tersebut dilakukan melalui metode Tatap Muka dan menggunakan media sosialisasi. (c) Materi Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerja Sama yang dilakukan pada kelompok sasaran media televisi, media radio, media cetak/massa yang melakukan kegiatan iklan. (e) Materi Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi, dengan kelompok sasaran mobilitas sosial seperti *car free day*, acara sosialisasi, jalan sehat, senam bersama yang dilakukan dengan cara pemberian souvenir, spanduk, leaflet. (f) Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi laman, tahapan yang ditujukan kepada pengguna gadget. Hal ini bertujuan agar masyarakt mengetahui informasi Pemilu dengan lebih mudah dan efisien. Tahapan tersebut mengunakan metode website/laman.

Selain tahapan sosialisasi di atas, KPU Kota Semarang juga melakukan kegiatan sosialisasi yang dibantu oleh DPT, PPK, PPS, dan KPPS. Adapun kegiatan yang dilakukan sebelum sosialisasi tingkatan ini kepada sasaran kelompok masyarakat umum yaitu kegiatan rekapitulasi DPS hasil perbaikan, penyampaian DPT ke PPS, pengumuman DPT ke PPS. Hal tersebut menggunakan metode koordinator wilayah.

Setelah diadakan kordinator wilayah, selanjutnya pada tingkatan PPK diadakan kegiatan sosialisasi, kirab, dan panitia koordinasi Pemilu tingkat Kecamatan yang ditujukan kepada kelompok sasaran masyarakat umum. Hal tersebut menggunakan metode tatap muka dan simulasi pemungutan suara tingkat Kecamatan. Kemudian pada tingkatan PPS, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi tentang perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, dan pemilu lanjutan (jika terjadi). Metode yang digunakan ialah sosialisasi dan simulasi pemungutan suara.

Yang selanjutnya pada tingkat KPPS, dengan satu kegiatan yakni sosialisasi perhitunga suara di 16 kecamatan dengan metode sosialisasi dan simulasi perhitungan suara dan pemungutan suara. Dari kegiatan tersebut KPU Kota Semarang secara garis besar melakukan tahapan yang dilakukan KPU sendiri sebanyak 21 kegiatan, kemudin yang dibantu PPK, PPS, dan KPPS yakni 15 kegiatan. Hal ini mengarah ke seluruh kelompoksasaran masyarakat dengan metode sosialisasi dan simulasi-simulasi yang sesuai dengan bahan KPU.

*Ketiga,* Setelah diadakannya rancangan strategi, pihak KPU Kota Semarang melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan elemen-elemen pemerintah dan masyarakat agar tujuan dari strategi KPU Kota Semarang dapat menyatu dengan sukses sosialisasi nantinya. *Keempat,* Faktor penghambat atau permasalahan didalam sosialisasi yang dialami KPU Kota Semarang yaitu : (a) Kurangnya jumlah personel dari pihak KPU Kota Semarang yang bertugas dalam pelaksanaan sosialisasi (b) Kondisi masyarakat yang terlalu cuek dengan keadaan politik kota, sehingga masyarakat kurang ada kesadaran (c) Masyarakat Kota Semarang sebagian hanya menikmati hiburan yang diselenggarakan pihak KPU seperti di acara *car free day* tanpa adanya keinginan untuk lebih aktif dalam pemilu. (d) Banyak warga yang tidak ber-KTP kota Semarang, mengingat banyak warga yang merupakan penduduk rantau atau bukan asli warga Semarang (e) Selain itu, banyak pula warga Semarang yang tidak berdomisili di Kota Semarang, sehingga tidak bisa berpartisipasi.

* 1. **Penutup**
     1. **Kesimpulan**

*Pertama*, Pelaksanaan Pendidikan politik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang, belum berjalan secara maksimal. Hal ini terindikasi pada hasil penelitian yang menunjukan belum maksimalnya peranannya dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pelaksanaan partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi politik generasi muda pada aktifitas politik.

*Kedua,* Media (partai politik) sebagai agregasi kepentingan masyarakat, harus lebih keras lagi membangun sistem komunikasi, salah satunya pada saat penjaringan aspirasi publik dalam forum konsultasi publik. Karena forum konsultasi publik merupakan media pertemuan antara DPRD dan masyarakat langsung untuk diharapkan dapat menjadi media untuk membangun komunikasi riil tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.

*Ketiga*, Pelaksanaan pendidikan politik, dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain: kegiatan pelatihan dan pembinaan, seminar, kajian-kajian, sosialisasi dan kegiatan sosial. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

*Keempat*, Di era demokrasi yang sekarang ini, masyarakat bukan lagi obyek melainkan subyek kebijakan. Partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol, mengevaluasi dan memberikan masukan baik kepada lembaga legislatif maupun eksekutif. Meningkatkan peran dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukan dalam pelaksanan pemilu.

* + 1. **Rekomendasi**

*Pertama,* Perlunya pemerintah dan stakeholder mengoptimalkan peran setiap agen pendidikan politik sebagai mitra bagi pelaksanaan pendidikan politik. Khususnya generasi muda diberi kesempatan serta tanggung jawab yang lebih luas dalam ruang publik seperti halnya dilibatkan sebagai anggota partai politik, ataupun organisasi sosial politik lainnya.

*Kedua,* Memasyarakatkan pendidikan politik bagi masyarakat di segala tingkatan dan usia. Bukan dalam bentuk politik praktis saja, namun politik yang mendidik dan mengakar agar nilai-nilai demokrasi tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam sebuah proses politik dipahami secara penuh, menyeluruh, dan disadari oleh setiap masyarakat. Sehingga dalam menentukan pilihan dan afiliasi politiknya, masyarakat dapat kritis menilai visi misi partai/calon kepala daerah secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan ketercapaian (feasibilitas) program pendidikan yang ditawarkan.

*Ketiga,* Pengutan kelembagaan partai politik perlu dilakukan karena mempengaruhi kenerja partai politik dalam melakukan kaderisasi. Kaderisasi yang buruk dari partai politik menyebabkan calon-calon dari parpol minim kualitas sehingga calon tidak bisa menghindari money politik untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih.

*Keempat,* Kualitas penyelenggara terutama ditingkat panitia ad hoc perlu dimaksimalkan. Terdapat masyarakat yang tidak memberikan suara karena masalah-masalah teknis. Sosialisasi KPU kepada masyarakat perlu digiatkan pula. Banyak yang tidak memilih karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapat informasi yang jelas terkait kewajiban pemilih. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa masyarakat harus menerima undangan sebagai syarat untuk mencoblos.

*Kelima,* E-Vote. Dalam konteks Pemilu langsung konsep E-Vote sangat mungkin diterapkan, khususnya daerah atau wilayah-wilayah yang secara sumber daya sudah memadai. Konsep E-Vote tersebut dapat mendukung terwujudnya Pemilu langsung yang efektif, dan efisien, serta meminimalisir potensi manipulasi penghitungan suara.

**DAFTAR PUSTAKA**

Almond, Gabriel and Bingham Powel, 1996, *Comparative Politics Development Approach,* Little Company, Bombai, India

Al Muchtar, Suwarma (2000) Pengantar Studi Sistem Politik Indonesia. Bandung. Gelar Pustaka Mandiri.

Assegaf Rahman Abd, 2012. Pendidikan Islam Kontekstual. Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

Robert Brownhill, and Smart D., 1989, *Politic Education*, London and New York Kolekledge

Winarno, Budi, 2010, Teori Dan Proses Kebijakan Publik, Yogjakarta: Madia Pressindo.

Zamroni, (2001), Pendidikan untuk Demograsi Tantangan Menuju Civil Society. Yogyakarta : Bigraf Publishing

**Peraturan Per-Undang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Thaun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak, 2002. Sinar Grafika, Jakarta